

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai transaksi keuangan perbankan yang kini semakin kompleks, maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memerintahkan bank umum dan non bank (perusahaan yang sudah mendapat persetujuan BI) sebagai lembaga yang dapat memperlancar lalu lintas pembayaran diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam memberikan pelayanan jasa-jasa bank kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan target BI tersebut, perbankan di tanah air mulai menggenjot pendapatan nonbunga (*non interest income*) demi meraup laba yang besar. Suku bunga kredit yang meningkat akan memicu perlambatan kredit sehingga berimbas pada pendapatan bunga. Oleh karena itu, perbankan mulai berpaling pada *non interest income*. Peningkatan *non interest income* harus ditopang dengan peningkatan pelayanan jasa-jasa kepada nasabah seperti transfer, inkaso, kliring, bank card, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran uang kuliah, pembayaran gaji dan sebagainya.

Untuk mengetahui seberapa besar *non interest income* yang diperoleh bank-bank yang memberikan pelayanan jasa-jasa kepada nasabah, maka diperlukan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro,

tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan requests*) nasabahnya.

Menurut Robert De Young dan Tara Rice (2003:29) *Real estate loans divided by total loans* (RESHARE) dapat diukur dari perbandingan antara jumlah kredit properti (*loan on property*) terhadap seluruh jumlah kredit yang diberikan. Ruang lingkup properti meliputi rumah tapak, rumah susun (apartemen, flat, kondominium dan griya tawang), rumah kantor dan rumah toko. Besarnya jumlah kredit properti yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Menurut Surat Edaran (SE) BI No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 yang berlaku efektif mulai 30 September 2013, Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan *Loan To Value (LTV)/Financing To Value (FTV)* untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan.

Robert De Young dan Tara Rice menjelaskan dalam penelitiannya mengenai *commercial and industrial loans* (C&ISHARE) yang dapat diukur dari perbandingan kredit debitur UMKM terhadap seluruh jumlah kredit yang diberikan. Dalam sistem LBU yang baru dengan sebutan LBU 2008 yaitu sistem pelaporan bank-bank umum kepada BI yang berlaku efektif sejak awal 2010, telah digunakan definisi kredit UMKM berdasarkan kriteria usaha sebagaimana dalam UU No.20/2008 tentang UMKM. Dalam sistem LBU 2008 tersebut diatur pelaporan berdasarkan kategori debitur meliputi 2 kategori : pertama, kategori Debitur UMKM yakni kredit yang diberikan kepada usaha produktif, dimana

didalamnya tidak termasuk kredit konsumsi dan kedua, kategori Bukan debitur UMKM yakni kredit yang diberikan kepada bukan usaha UMKM, didalamnya termasuk kredit untuk kegiatan konsumsi.

Sementara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1e dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Bank Indonesia adalah antara 85%-100%. Dalam membicarakan masalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka yang perlu kita ketahui adalah tujuan penting dari perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Tujuan perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dalam rangka memenuhi pinjaman kepada nasabah, bank harus mengetahui berapa besar modal yang akan membiayai kredit tersebut. Maka digunakan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan

pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber-sumber diluar bank.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, data Bank Indonesia (BI), kredit pemilikan rumah dan rumah susun tumbuh melampaui pertumbuhan kredit secara agregat. Per Juli 2012, pertumbuhan KPR tipe di atas 70 meter persegi (m^2) tumbuh 25,5% sedangkan KPRS tumbuh 63,3%. Padahal, sejak 15 Juni 2012, BI telah membatasi *Loan to Value* (LTV) menjadi 70%. Dengan kata lain, bank hanya menyalurkan kredit sebesar 70% dari harga rumah. Berdasarkan survei BI, indeks harga properti residensial di pasar primer naik 12,1% pada kuartal II 2013. Kenaikan tertinggi tercatat pada harga rumah dengan luas di bawah $36 m^2$ sebesar 16,7%. Kenaikan harga yang tinggi dipicu oleh permintaan terhadap rumah yang tinggi, baik untuk rumah tinggal maupun investasi. Total *outstanding* kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) mencapai Rp 301,53 triliun per Juni 2014, atau tumbuh 5,93% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penopang pertumbuhan kredit properti adalah permintaan kredit di segmen rumah mewah. Alhasil, harga properti rumah

mewah masih cenderung naik. Mengutip survei BI per Juli 2014, kenaikan harga properti diperkirakan naik tipis 0,89% pada triwulan III-2014. Tapi, pertumbuhan ini sudah melambat jika dibandingkan dengan kuartal II-2014 yang tumbuh sebesar 1,69%. Sedangkan total penyaluran kredit UMKM pada periode Januari - Juli 2012 mencapai Rp 681 triliun atau 33% dari rencana bisnis bank. Porsi kredit UMKM paling besar dikucurkan untuk sektor perdagangan yakni 46,6%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 10,5%, dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 7,8%. Adapun rata-rata bunga kredit UMKM tercatat 13,8%. Menurut data BI per Juli 2012, total penyaluran kredit secara keseluruhan mencapai Rp 2.538 triliun. Mengacu pada hal itu maka total penyaluran kredit UMKM yang telah mencapai Rp 681 triliun sudah mencapai 20 persen.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI), *non interest income* bank umum per Mei 2013 turun 8,1% menjadi Rp 57,81 triliun. Di sisi lain, pendapatan bunga meningkat 12,6% menjadi Rp 176,4 triliun per Mei 2012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya kendala dalam masalah infrastruktur telekomunikasi yang masih dikembangkan saat ini di Indonesia sehingga dalam memberikan pelayanan jasa-jasa bank kepada masyarakat belum optimal. Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Interest Income di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan dalam latar belakang, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kredit properti masih diminati oleh masyarakat terutama segmen rumah mewah yang cenderung naik dimana masyarakat akan dikenakan biaya administrasi, biaya provisi dan komisi serta biaya lainnya sehingga mendorong masyarakat lebih selektif dalam memilih pelayanan jasa-jasa yang memberikan biaya-biaya lebih kecil sehingga mendorong persaingan antar bank untuk semakin inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan *non interest income* mereka.
2. Kredit UMKM masih diminati oleh masyarakat dalam rangka menciptakan usaha yang produktif dimana masyarakat akan dikenakan biaya administrasi, biaya provisi dan komisi serta biaya lainnya sehingga mendorong masyarakat lebih selektif dalam memilih pelayanan jasa-jasa yang memberikan biaya-biaya lebih kecil sehingga mendorong persaingan antar bank untuk semakin inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan *non interest income* mereka.
3. Kegiatan utama bank dalam memberikan kredit atas dana yang mereka himpun bisa dalam jumlah besar maupun kecil, tergantung kebutuhan masyarakat. Suatu bank harus mampu bersaing dengan bank lainnya dalam memberikan kredit yang beragam kepada masyarakat atas dana yang mereka himpun Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin banyak

keuntungan yang diperoleh bank tersebut terutama dalam peningkatan *non interest income*.

4. Bank harus memperhatikan jumlah modal yang mereka miliki untuk dapat membiayai operasionalnya. Modal yang dimiliki harus dapat menjamin seluruh aktiva yang mengandung risiko agar bank tersebut bertahan dalam menghadapi persaingan dengan bank-bank lainnya. Modal bank bisa diperoleh dari modal sendiri atau dari sumber-sumber lain di luar bank. Dengan modal yang tinggi akan memungkinkan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan *non interest income* mereka.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menetapkan batasan-batasan masalah dalam penelitian yang diuraikan pada identifikasi masalah diatas, maka periode yang digunakan peneliti dibatasi dari tahun 2007 - 2013 dengan data sebagai berikut :

1. Untuk menghitung besarnya kredit properti yang disalurkan, maka peneliti akan menggunakan rasio keuangan yaitu RESHARE. RESHARE merupakan salah satu rasio yang mengukur komposisi jumlah kredit properti dibandingkan dengan jumlah seluruh kredit yang diberikan.
2. Untuk menghitung besarnya kredit UMKM yang disalurkan, maka peneliti akan menggunakan rasio keuangan yaitu C&ISHARE. C&ISHARE

merupakan salah satu rasio yang mengukur komposisi jumlah kredit UMKM dibandingkan dengan jumlah seluruh kredit yang diberikan.

3. Untuk menghitung besarnya kredit yang disalurkan, maka peneliti akan menggunakan rasio keuangan yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.
4. Untuk menghitung besarnya modal yang dimiliki, maka peneliti menggunakan salah satu rasio solvabilitas yang bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

D. Perumusan Masalah

Mengacu kepada judul penelitian mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Interest Income di Indonesia” peneliti bermaksud untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel RESHARE terhadap Non Interest Income?
2. Bagaimana pengaruh variabel C&ISHARE terhadap Non Interest Income?
3. Bagaimana pengaruh variabel LDR terhadap Non Interest Income?
4. Bagaimana pengaruh variabel CAR terhadap Non Interest Income?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Akademis

Menambah pengetahuan bagi pembaca terutama mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *non interest income*.

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *non interest income*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Indonesia

Memberikan informasi dalam mengambil kebijakan moneter yang berkaitan dengan *non interest income*.

b. Bagi Perbankan

Mendorong bank-bank agar selalu bersaing dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah ke arah yang lebih baik.